

Peran Dan Fungsi Pemerintah Dalam Perspektif Islam

Tengku Khairina

Magister Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pontianak
tengkukhairina2@gmail.com

Informasi Artikel

E-ISSN : 3026-6874
Vol: 2 No: 8 Agustus 2024
Halaman : 198-205

Abstract

In the Islamic economic system, economic activity is regulated proportionally so that individuals have freedom of action, but are still bound by certain limits while the government regulates policies based on the aspirations of the community. This study employs a method of library research or document study. In an Islamic economic perspective, the role and function of the government is crucial in regulating and developing a balanced and sustainable economy. The state has the right to be involved in individual economic activities, both to supervise and regulate / carry out economic activities that individuals are unable to do. The scope of the government's role is very broad in a socialist economic system, but limited in a purely capitalist economic system due to its capitalistic nature. Some of the primary roles of the state Islam include ensuring security and defense, administering justice, managing the economy and finances, and providing public services.

Keywords:

*Islamic
Economy
Government*

Abstrak

Dalam sistem ekonomi Islam, aktivitas Ekonomi diatur dengan cara proporsional sehingga individu memiliki kebebasan bertindak, namun tetap diikat oleh batasan tertentu sedangkan pemerintah mengatur kebijakan berdasarkan aspirasi masyarakat. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan studi kepustakaan atau studi literatur. atau dokumen. Dalam perspektif ekonomi Islam, peran dan fungsi pemerintah sangat krusial dalam mengatur dan mengembangkan perekonomian yang seimbang dan berkelanjutan. Negara memiliki kewenangan untuk terlibat dalam aktivitas Individu memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengatur pelaksanaan kegiatan ekonomi yang mereka lakukan. dilakukan oleh individu. Cakupan Pemerintah memiliki peran yang sangat dominan dalam sistem ekonomi yang bersifat sosialis, tetapi memiliki keterbatasan yang lebih besar dalam sistem ekonomi kapitalis murni karena sifat kapitalistik. Beberapa fungsi utama negara dalam Islam mencakup menjamin keamanan dan pertahanan, menyelenggarakan peradilan, mengelola ekonomi dan keuangan, serta memberikan pelayanan publik.

Kata Kunci : Ekonomis, Islam, Pemerintah

PENDAHULUAN

Dalam sistem dalam ekonomi Islam, aktivitas ekonomi diatur dengan proporsionalitas sehingga individu dapat menikmati kebebasan bertindak, namun tetap diikat oleh batasan tertentu sedangkan pemerintah mengatur kebijakan berdasarkan aspirasi masyarakat. Adanya kebijakan dari pemerintah ini mendorong terciptanya keseimbangan dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dapat menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang adil dan sejahtera.

Setiap penduduk memiliki hak yang sama dan kesempatan adil dalam perlakuan dari negara dan sesama Individu. Sebagai warga harus mengutamakan prinsip keadilan ditegakkan oleh Pemerintah dalam berbagai aspek kehidupan, seperti agama, pendidikan, kesehatan, hukum, dan politik, dan Di dalam ekonomi, keadilan merupakan salah satu prinsip utama dalam ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dengan menerapkan keadilan ini, dapat tercapai keseimbangan ekonomi dengan mengurangi kesenjangan antara orang yang memiliki modal dan mereka yang memerlukan modal.(Fadila & Ghafur, 2010).

Peran dan fungsi pemerintah dari segi pandangan ekonomi Islam memainkan peranan yang vital dalam mengatur dan mengembangkan perekonomian yang seimbang dan berkelanjutan. Dalam pandangan ekonomi Islam, kegiatan konsumsi harus selalu selaras dengan tujuan penciptaan manusia, yaitu untuk mendapatkan kemakmuran dan Kesejahteraan baik dalam kehidupan dunia maupun

kehidupan akhirat. Dalam sistem ekonomi Islam, semua kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, dan impor, dan ekspor selalu dikaitkan dengan kehendak Allah SWT. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan masyarakat yang sempurna, yang adil dan sejahtera, dengan melindungi yang lemah dan berperan aktif dalam masalah ekonomi. Oleh karena itu, seorang khalifah harus mampu mencapai stabilitas ekonomi dengan mendistribusikan kekayaan kepada orang miskin yang diambil dari Baitul Mal. Dengan distribusi ini, keseimbangan sosial dapat tercapai. (Ulya, 2017).

Pemerintah memiliki beberapa peran penting dalam sektor ekonomi, termasuk penyediaan jaminan sosial, pencapaian keseimbangan sosial, dan intervensi. Menurut Muhammad Baqir Al Shadr, dalam bidang ekonomi, tanggung jawab pemerintah di bidang ekonomi meliputi penyediaan jaminan sosial, mencapai keseimbangan sosial, serta melakukan intervensi dalam aktivitas ekonomi. (Irsyad, 2018).

Dalam sudut pandang agama Islam, pemenuhan kebutuhan dasar hidup manusia, seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal, harus didasari oleh nilai-nilai spiritual. Selain itu, juga harus ada keseimbangan dalam mengelola kekayaan yang dimiliki. Selanjutnya, Tanggung jawab Manusia dalam memenuhi kebutuhannya harus terbatas pada tingkat yang mencukupi (*had al-kifayah*), baik untuk individu maupun keluarga.

Dalam perspektif Ekonomi Islam, distribusi dan penggunaan pendapatan negara harus didasarkan pada dua prinsip fundamental yang terkait dengan kemanusiaan, yaitu kebebasan dan keadilan. Hal ini didasari pada pemahaman bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pendapatan negara dialokasikan demi kepentingan masyarakat secara luas, bukan hanya untuk kepentingan individual atau kelompok tertentu.

Dalam perspektif Islam, pemerintah juga memiliki peran besar dalam mendorong perkembangan ekonomi kerakyatan. Hal ini dapat dilakukan Dengan berfokus pada meningkatkan produktivitas dan daya saing di sektor ekonomi rakyat, salah satu pendekatannya adalah dengan memberikan peran yang lebih signifikan kepada usaha kecil menengah dan koperasi, yang telah terbukti memberikan kontribusi signifikan dalam menghadapi dampak globalisasi ekonomi, keterbatasan lapangan pekerjaan, serta peningkatan pendapatan masyarakat (Batubara & Natari Manik, 2023).

Dengan demikian, peran dan fungsi pemerintah dalam konteks ekonomi Islam memegang peranan penting dalam menciptakan keseimbangan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus memastikan bahwa pendapatan negara digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan pribadi, dan juga memberikan ruang yang lebih luas bagi Usaha kecil menengah dan koperasi, yang terbukti memiliki kontribusi dalam menunjang mengantisipasi dampak globalisasi ekonomi.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji peran dan fungsi pemerintah dalam perspektif ekonomi Islam. Diharapkan Penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan sumbangan yang signifikan, baik dalam konteks teori maupun praktik, terutama dalam pengembangan sistem ekonomi Islam yang ideal. Dengan memahami lebih dalam tentang peran dan fungsi pemerintah dalam ekonomi Islam, diharapkan dapat membantu dalam menciptakan keseimbangan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Penelitian mengenai peran negara dalam perekonomian menurut perspektif Islam sangat penting karena memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana negara dapat berfungsi dalam sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks sistem ekonomi global yang beragam, penting untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip Islam mempengaruhi peran negara dalam mengatur dan mengelola aktivitas ekonomi. Dengan adanya perbedaan yang signifikan antara ekonomi kapitalis, sosialis, dan ekonomi Islam, penelitian ini dapat memberikan panduan yang jelas mengenai bagaimana negara dapat menjalankan fungsinya dalam konteks ekonomi Islam, serta bagaimana hal tersebut dapat diterapkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menjelaskan peran negara dalam ekonomi Islam, termasuk bagaimana negara terlibat dalam pengawasan, pengaturan, dan pelaksanaan kegiatan ekonomi. Penelitian ini akan membahas tiga kategori peran negara menurut perspektif Islam—peran yang diamanahkan secara permanen oleh syariat, peran turunan dari syariat berdasarkan ijtihad, dan peran yang ditentukan melalui musyawarah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran negara dalam ekonomi Islam dapat memastikan distribusi pendapatan yang adil, mengelola sumber daya alam, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan atau studi literatur. atau dokumen. Pemilihan metode ini bertujuan untuk mengkaji berbagai penelitian terdahulu dan sumber referensi ilmiah yang berkaitan dengan peran serta fungsi pemerintah dalam perspektif ekonomi Islam. Dengan melakukan telaah terhadap literatur yang relevan, diharapkan Penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang bermakna baik secara teori maupun praktis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Negara Dalam Persepektif Islam

Dalam kehidupan bermasyarakat, peran dan tanggung jawab pemerintah tidak dapat diabaikan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan penertiban dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam perspektif Islam, tanggung jawab pemerintah memiliki tingkat fleksibilitas yang besar. Hal ini berdasarkan keyakinan bahwa Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi rakyat. Oleh karena itu, konteks negara Islam, pemerintah dapat mendefinisikan berbagai fungsinya demi mencapai tujuan tersebut (Ismail, 2008). Lebih lanjut, Sidiqi (1983) memetakan Peran negara dalam pandangan Islam dalam tiga kategori:

1. Fungsi yang bersifat tetap dan telah ditetapkan oleh syariat ialah:
 - a. Keamanan negara
 - b. Penegakan hukum dan keteraturan
 - c. Mempertahankan pemerataan
 - d. Memenuhi keperluan masyarakat
 - e. Menyampaikan ajaran dan mengajak pada kebaikan serta mencegah keburukan
 - f. Pengelolaan administrasi sipil
 - g. Melaksanakan tanggung jawab sosial
2. Fungsi yang diturunkan dari hukum syariah berasal dari hasil ijtihad yang sesuai dengan keadaan sosial dan ekonomi saat ini. Fungsi-fungsi ini mencakup:
 - a. Perlindungan alam
 - b. Menyediakan infrastruktur untuk kepentingan umum
 - c. Kegiatan riset
 - d. Penghimpunan modal dan pengembangan ekonomi
 - e. Memberikan subsidi kepada sektor perusahaan swasta tertentu
 - f. Manajemen anggaran yang dibutuhkan untuk menjaga kestabilan kebijakan

3. Fungsi negara yang didasarkan pada proses musyawarah (syura) sesuai kontekstual. Kategori ini mencakup semua kegiatan yang dipercayakan oleh masyarakat untuk diputuskan melalui proses musyawarah. Sidiqi menegaskan bahwa kategori ini bersifat terbuka dan dapat bervariasi di setiap negara, tergantung pada situasi dan kondisi masing-masing.

Dalam perspektif Islam, bentuk pemerintahan bukanlah suatu hal yang telah ditetapkan secara spesifik. Hal tersebut merupakan persoalan yang diserahkan kepada kaum muslim untuk melakukan ijtihad (penalaran independen) dengan mempertimbangkan manfaat, kemaslahatan, serta berbagai standar yang berlaku di zamannya masing-masing (Al-Jabiri, 2001). Ketika berbicara tentang bidang ekonomi, fokusnya tertuju pada aspek ekonomi makro. Beberapa isu penting dalam konteks ekonomi suatu negara, ini mencakup pertumbuhan ekonomi dan fluktuasi kegiatan ekonomi, pengangguran, serta inflasi (Ismail, 2009).

Dalam Islam, negara memiliki legitimasi untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu. Keterlibatan tersebut dapat berupa pengawasan terhadap kegiatan ekonomi maupun pengaturan serta pelaksanaan beberapa macam-macam aktivitas ekonomi yang tidak mampu dilakukan secara individual. Negara dianggap memiliki kapasitas untuk mengintervensi kegiatan ekonomi masyarakat jika dirasa perlu untuk menjaga keseimbangan dan kemaslahatan bersama.

B. Peran Pemerintah dalam Ekonomi Islam

Dalam Dalam sistem ekonomi sosialis, pemerintah memiliki peran yang sangat signifikan dan dominan, sedangkan dalam sistem ekonomi kapitalis yang murni, peran pemerintah jauh lebih terbatas. Prinsip ini sejalan dengan pandangan yang diutarakan oleh Adam Smith., di mana ia menyatakan bahwa dalam sistem kapitalis, pemerintah hanya memiliki tiga fungsi utama yaitu sebagai berikut. (Batubara & Natari Manik, 2023)

1. Menegakkan keadilan dan menjamin penegakan hukum di dalam masyarakat.
2. Menjaga keamanan dalam negeri serta mempertahankan kedaulatan negara.
3. Menyediakan barang-barang umum yang tidak bisa diproduksi oleh perusahaan swasta, seperti pembangunan infrastruktur umum seperti bendungan.

Perbedaan karakteristik sistem ekonomi suatu negara akan tercermin dalam kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan. Secara umum, terdapat tiga model sistem ekonomi yang diakui secara global, termasuk sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi kapitalis, dan sistem ekonomi berbasis Islam.

1. Ekonomi Sosialis

Pengaruh kuat dari paham kapitalis yang dominan menyebabkan hilangnya kebebasan bagi individu untuk melakukan aktivitas ekonomi secara mandiri, karena semuanya diarahkan untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu, konsep kepemilikan atau kekayaan pribadi tidak diakui, dan paham sosialis yang mendorong menuju komunisme menjadi lebih diterima. Dalam sistem ekonomi sosialis, negara memiliki peran penting yaitu :

- a. Pemerintah menetapkan seluruh kebijakan ekonomi dalam lingkup pemerintahan.
- b. Pemerintah juga berperan aktif dalam perencanaan, implementasi, hingga pengawasan.
- c. Negara juga memegang tanggung jawab untuk mengontrol harga-harga dan distribusi barang.

2. Sistem ekonomi kapitalis

Dalam sistem ekonomi kapitalis, peran negara cenderung lebih terbatas jika dibandingkan dengan sistem ekonomi sosialis. Sistem ini lebih bertumpu pada mekanisme pasar sebagai penggerak utama. Menurut pemikiran Adam Smith, dengan peran negara yang terbatas tersebut, optimalisasi kesejahteraan individu di lingkup mikro serta kesejahteraan negara di lingkup makro dapat tercapai melalui tiga peran utama pemerintah, yaitu menjamin

keadilan, memastikan stabilitas, dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pasar bebas. Oleh karena itu, pemerintah harus bertindak adil dalam menjalankan perannya demi mencapai kesejahteraan bersama.

- a. Terdapat prinsip pemisahan dan independensi antara divisi kekuasaan eksekutif, badan legislatif dan yudikatif.
 - b. pemerintahan harus dibatasi kewenangannya, dengan cara mewajibkan pemerintah untuk tunduk dan patuh pada hukum serta menjunjung keadilan.
 - c. diperlukan adanya kekuatan di luar pemerintahan yang bertugas mengawasi dan menjamin bahwa pemerintah senantiasa bertindak secara adil dan tidak menyalahgunakan kekuasaannya.
3. Sistem ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, fokus utamanya ialah pada terciptanya kesetaraan dalam penyebaran pendapatan di masyarakat. Pemerintah memiliki peran sebagai pengawas yang memastikan berjalannya mekanisme pasar bebas sesuai aturan. Meskipun kepemilikan pribadi diakui, Islam mewajibkan zakat bagi mereka yang telah mencapai tingkat kekayaan tertentu (nisab) untuk disalurkan kepada yang kurang mampu. Selain itu, sistem ekonomi Islam didasarkan pada empat pilar utama, yaitu Konsep tentang tauhid, keadilan, keseimbangan, dan kebebasan. Dalam mengatasi permasalahan ekonomi, Islam menekankan menciptakan sistem distribusi ekonomi yang merata di antara seluruh lapisan masyarakat, sebab inti dari masalah ekonomi terletak pada ketimpangan distribusi kekayaan.

Dalam sistem ekonomi Islam, negara memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berkreasi dalam kegiatan ekonomi. Namun, Negara juga memiliki peran untuk mengatur perekonomian dengan tujuan meningkatkan kebahagiaan masyarakat, dengan hasil akhir akan memperkuat negara itu sendiri. Beberapa hal yang harus dilakukan oleh negara terkait perannya dalam Ekonomi Islam adalah:

1. Mendorong sektor swasta dengan memperhatikan kepentingan masyarakat umum.
2. Sumber daya alam dikelola secara kolektif, dengan menyewakan lahan kepada masyarakat umum.
3. Kebijakan mengenai investasi yang diterapkan secara langsung.
4. Proyek yang dilakukan oleh individu namun bermanfaat bagi banyak orang.
5. Mengatasi kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
6. Memelihara konsistensi nilai mata uang yang sebenarnya.
7. Memastikan keadilan sosial dan ekonomi.

C. FUNGSI NEGARA ISLAM

Di antara beberapa fungsi negara dalam Islam adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Keamanan dan Pertahanan:
 - Fungsi ini meliputi perlindungan negara dari ancaman luar dan internal. Dalam Islam, pertahanan negara dianggap sebagai Jihad bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara, stabilitas keamanan, serta melindungi agama, bangsa, dan negara. Perang dilakukan sebagai upaya pertahanan terhadap musuh-musuh yang secara jelas menyerang umat Islam, mengancam stabilitas keamanan umat, serta merugikan kedaulatan negara dan agama.
2. Fungsi Penyelenggaraan Peradilan:
 - Fungsi ini meliputi pengadilan yang berkaitan dengan aspek keperdataan maupun yang terkait dengannya. Dalam Islam, peradilan bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan, serta mengawasi supaya semua peraturan ditaati. Peradilan juga berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan perselisihan dan mengadili perkara yang terjadi dalam masyarakat.
3. Fungsi Ekonomi dan Keuangan:

- Fungsi ini meliputi pengelolaan ekonomi dan keuangan negara. Dalam Islam, ekonomi dan keuangan dianggap sebagai bagian dari fungsi negara yang bertujuan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Negara bertugas untuk mengelola sumber daya dan mengatur sistem ekonomi agar dapat memberikan keamanan dan kemakmuran kepada masyarakat.
4. Fungsi Urbanisasi dan Penghidupan Masyarakat:
 - Fungsi ini meliputi pengembangan infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat. Dalam Islam, urbanisasi dan penghidupan masyarakat dianggap sebagai bagian dari fungsi negara yang bertujuan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Negara bertugas untuk mengembangkan fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat, seperti rumah, jalan, dan lain-lain, serta memberikan keamanan dan kemakmuran kepada masyarakat.
 5. Fungsi Solidaritas Sosial:
 - Fungsi ini meliputi pengembangan solidaritas dan kerukunan antar masyarakat. Dalam Islam, solidaritas sosial dianggap sebagai bagian dari fungsi negara yang bertujuan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Negara bertugas untuk mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan solidaritas dan kerukunan antar masyarakat, serta memberikan keamanan dan kemakmuran kepada masyarakat.
 6. Fungsi Perlindungan Dakwah:
 - Fungsi ini meliputi perlindungan dan pengembangan dakwah yang bersumber dari akidah Islam dan moral dan perintah kebajikan serta larangan kemungkaran. Dalam Islam, dakwah dianggap sebagai bagian dari fungsi negara yang bertujuan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Negara bertugas untuk mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan dakwah dan memberikan keamanan dan kemakmuran kepada masyarakat. Pengembangan nilai-nilai moral dan agama yang menjadi dasar shalat dan urusan duniawi. Dalam Islam, amar ma'ruf & nahi munkar dianggap sebagai bagian dari fungsi negara yang bertujuan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
 7. Fungsi Pelayanan Publik:
 - Fungsi ini meliputi penyebarluasan ilmu pengetahuan dan pendidikan, serta lain-lain. Dalam Islam, pelayanan publik dianggap sebagai bagian dari fungsi negara yang bertujuan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Negara bertugas untuk mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan pelayanan publik dan memberikan keamanan dan kemakmuran kepada masyarakat.

D. Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Perekonomian

Adapun Tanggung jawab utama pemerintah dalam perekonomian adalah sebagai berikut:

1. Memantau faktor-faktor utama yang mendorong perekonomian

Pemerintah perlu mengawasi pergerakan perekonomian dengan memantau serta melarang praktik-praktik yang tidak etis dalam sistem perdagangan, produksi, konsumsi, dan distribusi. Pengawasan dilakukan oleh tim independen, dikenal sebagai ahl al hisbah, yang bertugas mengawasi berbagai lembaga, pabrik, dan perusahaan untuk mencegah pengambilan keuntungan yang tidak pantas dari masyarakat dengan cara yang tidak adil.
2. Menghentikan transaksi yang dilarang

Muamalah haram merujuk kepada berbagai bentuk transaksi yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, yang berakar pada moralitas dan mempertahankan kepentingan umum, seperti riba, penimbunan, dan monopoli. Islam sangat peduli terhadap perekonomian umat, karena itu, Islam memberikan jaminan untuk melindungi kepemilikan harta setiap individu agar tidak disia-siakan atau digunakan secara boros.
3. Menetapkan harga jika diperlukan

Para ulama fiqh memiliki pendapat yang berbeda tentang keabsahan atau keharaman mematok harga. Sebagian dari mereka mengharamkannya dengan alasan terdapat beberapa

nash (dalil) yang melarang praktik ini. Salah satunya adalah riwayat dari Anas bin Malik tentang masa Rasulullah SAW, di mana harga-harga barang pernah naik secara signifikan. Para sahabat mengusulkan kepada Nabi untuk menetapkan harga-harga tersebut. Namun, Nabi menjawab, "Allahlah yang menetapkan ketersediaan rezeki dan kemakmuran. Aku berharap bahwa di hari aku bertemu dengan Allah, tidak ada seorang pun yang menuntutku karena kedzalimanku terhadapnya, baik dalam hal jiwa maupun harta." (Enam, n.d.)

Dari hadis ini, dapat disimpulkan bahwa menetapkan harga secara sewenang-wenang dianggap sebagai perilaku yang tidak diperbolehkan (haram) dan dianggap sebagai bentuk kedzaliman. Rasulullah SAW dengan tegas menolak melakukan perlakuan yang tidak adil terhadap siapapun. Meskipun tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal ini, perlu dicatat bahwa kondisi sosial pada masa Rasulullah jelas berbeda dengan kondisi sosial saat ini, terutama dalam konteks kebaikan atau keburukan dari menetapkan harga.

Islam menyarankan agar penetapan harga dilakukan melalui mekanisme pasar, yang didasarkan pada daya tarik antara permintaan dan penawaran. Pemerintah tidak diperbolehkan untuk mendukung pihak pembeli melalui mengatur harga untuk menguntungkan pembeli dengan menetapkan harga rendah, atau menguntungkan penjual dengan menetapkan harga tinggi.

KESIMPULAN

Dalam pandangan Islam, negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab ini Prinsip Islam memberikan ruang yang luas untuk mencapai kesejahteraan umum. Dalam perspektif Islam, negara memiliki kewenangan untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi individu, baik untuk pengawasan, pengaturan, maupun pelaksanaan beberapa kegiatan ekonomi yang tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh individu.

Peran negara dalam pandangan Islam dapat dibagi menjadi tiga kategori: pertama, peran yang diamanahkan secara permanen oleh syariat; kedua, peran turunan dari syariat yang didasarkan pada ijtihad sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi; ketiga, peran yang ditentukan secara kontekstual melalui proses musyawarah (syura).

Peran pemerintah dalam ekonomi Islam lebih luas dibandingkan dalam sistem ekonomi kapitalis, tetapi lebih terbatas dibandingkan dalam sistem ekonomi sosialis. Pemerintah berperan dalam menjaga keadilan, keamanan, dan menyediakan barang-barang publik, serta memainkan peran aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan ekonomi.

Secara keseluruhan, peran dan fungsi pemerintah dalam ekonomi Islam adalah memastikan distribusi pendapatan yang adil, mengawasi mekanisme pasar, mengelola sumber daya alam untuk kepentingan umum, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

REFERENCES

- Al-Jabiri, M. 'Abid. (2001). *gama Negara dan Penerapan Syariah*. Fajar Pustaka Baru.
- Batubara, M., & Natari Manik, F. (2023). Peran Dan Fungsi Pemerintah Dalam Perspektif Islam. *Journal Of Social Science Research*, 3(2), 6080–6090. <https://j-innovative.org/index.php/innovative>
- H.R Imam Enam. *Bukhari, Muslim, Abu Daud, Turmudzi, Ibnu Majah*.
- Fadila, N., & Ghafur, A. (2010). Peran pemerintah dalam ekonomi islam. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(1), 1–18.
- Irsyad, M. (2018). *ALOKASI PENDAPATAN NEGARA MENURUT IBNU TAIMIYAH DAN MUHAMMAD BAQIR AL SADR* [INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON].

<https://repository.syekhnurjati.ac.id/9775>

Ismail, N. (2008). *Ekonomi Islam "Persepektif Konsep, Model, Paradigma, Teori dan Aspek Hukum*. Vira Jaya Multi Pres.

Ismail, N. (2009). *Ekonomi Islam "Persepektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum"*. CV. Putra Media Nusantara.

Ulya, N. (2017). *ANALISIS PENENTUAN HARGA GABAH OLEH TENKULAK MENURUT PANDANGAN EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DI DESA WONOKETINGAL KARANGANYAR DEMAK) [(STAIN) Kudus]*. <http://repository.iainkudus.ac.id/1673>